



Sosialisasi K3 Tentang Implementasi *Emergency Respon Plan* Kantor Kelurahan Tembok Dukuh Kota Surabaya

Nikhen Hanifah Alvianshah¹, Moch. Sahri²

^{1,2} Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

ABSTRACT

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH SOCIALIZATION ABOUT IMPLEMENTATION OF EMERGENCY RESPONSE PLAN DISTRICT OFFICE TEMBOK DUKUH, SURABAYA CITY. Understanding Emergency Response Plan and its facilities at tembok dukuh Sub District Office to improve security and alertness in dealing with disasters. Identification of K3 implementation problems, socialization of K3 and application of emergency Response plan, licensing as well as the application of emergency Response plan facilities in the form of evacuation routes are supported with open arms , so that the Tembok Dukuh village office arises a sense of alertness to natural disasters Community Service is carried out with the target of all Tembok Dukuh village office workers both civil servants (PNS) to outsourced labor. . Tembok dukuh village office basically still found many discrepancies in aspects of Occupational Safety and health (K3). Many work activities carried out in the office which certainly has a risk of danger, so K3 is needed. The village office is a workplace with most of the important administrative file archives and there is still a lot of potential for a fire such as electrical cables that are scattered. The office workers of Tembok Dukuh village do not fully have a disaster preparedness attitude and there is no supporting Emergency Response Plan facility. Seeing the real conditions in the village office, then with it carried out socialization of community service on K3, especially Emergency workers understand the education delivered premises evidenced by the response or feedback in the form of questions and sharing related to K3 offices, especially on the topic of Emergency Response Plan of workers. Socialization of Emergency Response Plan Basically must be owned and disipakan by all aspects of the work. In line with law No. 1 of 1970 article 3 which states that" providing an opportunity or way to save themselves during a fire or other dangerous events", the entire workplace needs an evacuation map which is interpreted as a description of the rescue path when an emergency occurs so that it is easier to do. In this socialization, participants were not only given a theoretical understanding related to the implementation of the K3 Emergency Response Plan, but participants were also introduced to related Emergency Response Plan facilities, one of which was in the form of evacuation routes.

Keywords: District Office, Emergency Respon Plan, Occupational Health And Safety

Received: 09.07.2022	Revised: 17.10.2022	Accepted: 22.11.2022	Available online: 30.11.2022
-------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------

Suggested citation:

Alvianshah, N, H & Sahri, M (2022). Sosialisasi K3 Tentang Implementasi *Emergency Respon Plan* Kantor Kelurahan Tembok Dukuh Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(4), 876-882. DOI: 10.30653/002.202274.170.

¹ Corresponding Author: Program Studi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya : Jl. Raya Jemursari No. 57 Jemur Wonosari Kec . Wonocolo. Kota Surabaya, Jawa Timur 60237; Email : nikhenhanifah007.k319@student.unusa.ac.id

Open Access | URL: <http://jurnal.unmabanten.ac.id/index.php/jppm/>

PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disingkat dengan K3 ini implementasinya telah menyebar secara luas di hampir setiap sektor. K3 didefinisikan sebagai suatu upaya perlindungan agar setiap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja senantiasa dalam keadaan yang sehat dan selamat serta sumber-sumber proses produksi dapat dijalankan secara aman, efisien dan produktif (Tarwaka, 2008). Secara resmi, Pemerintah Indonesia telah mewajibkan kepada setiap pengusaha untuk memenuhi aspek keselamatan kerja di segala tempat kerja yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Dasar pertimbangan pemenuhan aspek keselamatan kerja tidak hanya ditujukan bagi tenaga kerja melainkan untuk semua orang yang berada di tempat kerja, seperti yang tertuang dalam pertimbangan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaannya, setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya dan setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien

Seluruh aspek kerja tentunya membutuhkan aspek K3, salah satunya ialah K3 yang berada di bangunan gedung perkantoran. Bangunan gedung perkantoran merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan perkantoran. Bangunan gedung perkantoran yang selama ini relatif aman, sebenarnya dihadapkan dengan berbagai risiko bahaya keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, banjir dan lain-lain. Potensi bahaya ini dianggap kecil oleh sebagian besar pemilik, pengelola maupun penghuni bangunan gedung perkantoran, karena kegiatannya hanya perkantoran, sehingga perencanaan dan persiapan untuk menghadapi keadaan darurat relatif diabaikan. Kondisi lain adalah, jika terjadi keadaan darurat semua penghuni bangunan gedung perkantoran mengalami kepanikan dan tidak dapat merespon dengan cepat karena tidak memahami apa yang harus dilakukan

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah kasus kebakaran tinggi, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari awal tahun 2013 hingga awal Februari 2015 tercatat 890 terjadi dengan skala menengah hingga skala besar. Dengan rincian 398 kasus terjadi tahun 2013, 471 kasus terjadi pada tahun 2014 sementara 21 kasus lainnya terjadi pada awal 2015. Sebagai Negara dengan iklim tropis dan pemukimannya yang padat Indonesia merupakan Negara dengan kategori rawan kebakaran. Pemerintah Kota Surabaya mencatat selama tahun 2014 dialokasikan sebanyak Rp 54,4 Milyar dan sudah terpakai Rp 52,9 Miliar atau 96,76% dari jumlah total anggaran yang telah dialokasikan. Dana itu dikeluarkan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran yang sepanjang tahun 2014 mencapai 596 kejadian. Dengan jumlah kejadian mencapai angka 596 kejadian, maka rata-rata terjadi 1,63 per hari, yang menunjukkan tingginya potensi terjadinya kejadian kebakaran. Maka sebuah gedung seharusnya memiliki sistem tanggap darurat sehingga dapat mengurangi resiko adanya korban jiwa (Heryawan, 2015).

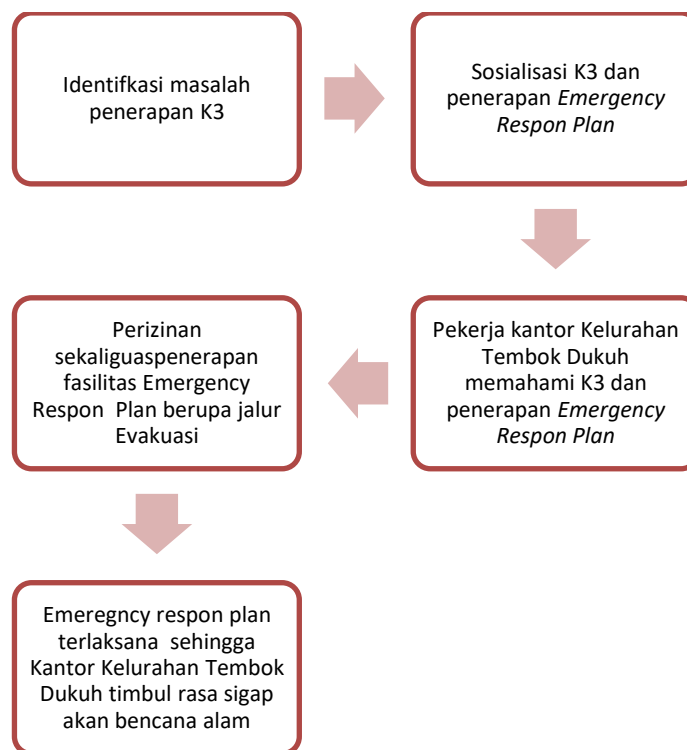
Kantor kelurahan tembok dukuh Surabaya merupakan tempat penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan ketertiban umum terhadap lenaga kemasyarakatan. Banyak aktivitas pekerjaan yang dikakukan pada kantor tersebut. Hasil survey yang

dilakukan pada Kantor Kelurahan Tembok Dukuh Surabaya, terbukti tidak ada fasilitas *Emergency Respon Plan* yang mendukung serta kurangnya pemahaman pekerja kelurahan terkait *Emergency Respon Plan*.

Dokumen ini adalah *template*. Sebuah salinan elektronik yang dapat diunduh dari situs web *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. Untuk pertanyaan atas kertas panduan, silakan hubungi panitia publikasi jurnal seperti yang ditunjukkan pada situs web. Cara paling mudah untuk memenuhi persyaratan format penulisan adalah dengan menggunakan dokumen ini sebagai *template*. Kemudian ketikkan teks Anda ke dalamnya. Dari permasalahan di atas, maka dilakukan sosialisasi pemahaman *Emergency Respon Plan* beserta fasilitasnya guna meningkatkan keamanan serta kesiapan dalam menghadapi bencana.

METODE

Metode pelaksanaan untuk pemecahan masalah ialah tertera kerangka konsep pada gambar 1. Pengabdian masyarakat ini memiliki sasaran pada pekerja yang menjadi penghuni kantor kelurahan Tembok Dukuh.



Gambar 1. Kerangka Konsep Solusi Permasalahan K3 Emergency Respon Plan (ERP)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat dilakukan dengan sasaran seluruh pekerja kantor kelurahan Tembok Dukuh baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga tenaga kerja *outsourcing*. Pihak kelurahan sangat mendukung dengan adanya sosialisasi K3 ini,

sehingga seluruh aspek K3 khususnya terkait *emergency respon plan* dapat diterima dan di implementasikan secara lanjut.

Kantor kelurahan tembok dukuh pada dasarnya masih banyak ditemukan ketidaksesuaian pada aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Banyak aktivitas pekerjaan yang dilakukan pada kantor tersebut yang tentunya memiliki risiko bahaya, sehingga K3 sangat dibutuhkan. Kantor kelurahan ialah tempat kerja dengan sebagian besar menyimpan arsip berkas administrasi yang penting serta masih terdapat banyak potensi terjadinya suatu kebakaran seperti kabel listrik yang letaknya berceceran. Pekerja Kantor Kelurahan Tembok Dukuh sepenuhnya belum memiliki sikap kesiapsiagaan akan bencana serta belum terdapatnya Fasilitas *Emergency Respon Plan* yang mendukung.



Gambar 2. Kantor Kelurahan Tembok Dukuh sebelum terdapat Fasilitas *Emergency Respon Plan*

Melihat kondisi nyata pada kantor kelurahan, maka dengan itu dilakukan sosialisasi pengabdian masyarakat mengenai K3 Khususnya *Emergency Respon Plan* kantor kelurahan Tembok Dukuh itu sendiri. Kegiatan pengabdian masyarakat berjalan sesuai dengan harapan dibuktikan dengan seluruh pekerja yang menyambut kegiatan ini dengan tangan terbuka, antusias pekerja pada saat dilakukan sosialisasi dengan sangat memperhatikan mulai dari awal hingga akhir, pekerja memahami edukasi yang disampaikan dengan dibuktikan adanya respon atau *feedback* berupa pertanyaan dan sharing terkait K3 Perkantoran khususnya pada topic *Emergency Respon Plan* dari pekerja.



Gambar 3. Sosialisai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) *Emergency Respon Plan*

Sosialisasi *Emergency Respon Plan* pada dasarnya wajib dimiliki dan disiapkan oleh seluruh aspek pekerjaan. Keadaan darurat dapat disebabkan karena perbuatan manusia maupun oleh alam, dapat terjadi setiap saat dan dimana saja untuk disetiap unit kerja perlu mempersiapkan suatu cara penaggulannya bila terjadi keadaandarurat bilamana terjadi bencana, maka perusahaan perlu memikirkan kemungkinan terjadinya dampak kerugian.



Gambar 4. Penerapan Fasilitas *Emergency Respon Plan* berupa Jalur Evakuasi

Sejalan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 pasal 3 yang menyatakan bahwa “Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya”, seluruh tempat kerja perlu adanya peta evakuasi yang di artikan sebagai gambaran jalur penyelamat ketika terjadi keadaan darurat sehingga lebih mudah dilakukan. Pada pelaksanaan sosialisasi ini peserta tidak

hanya diberikan pemahaman secara teori terkait pelaksanaan K3 *Emergency Respon Plan*, melainkan peserta dikenalkan juga terkait fasilitas-fasilitas *Emergency Respon Plan* salah satunya berupa jalur evakuasi. Seluruh pekerja Kantor Kelurahan Tembok Dukuh menyambut pengimpelemntasian jalur evakuasi dengan tangan terbuka serta memahami dengan sanga baik.



Gambar 5. Kantor Kelurahan Tembok Dukuh setelah Dilakukan Implementasi Fasilitas *Emergency Respon Plan*

SIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaa kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah (1) Pemahaman para pekerja Kelurahan Tembok Dukuh selaku peserta pengabdian masyarakat sosialisai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan *Emergency Respon Plan* adalah sangat rendah, dan tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa sarana dan lingkungan kerja dapat menjadi sumber kecelakaan dan menimbulkan bencana namun setelah kegiatan ini dilaksanakan pemahaman dan wawasan para peserta menjadi bertambah, (2), Setelah dilakukannya sosialisasi beserta implementasinya, dapat menambah daya Tarik peserta untuk memahami tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khususnya *Emergency Respon Plan*, dan (3) Pengenalan K3 menyadarkan seluruh pekerja kelurahan bahwsannya aspek K3 sangat penting dan *Emergency Respon Plan* sangat dibutuhkan sebagai bentuk kesigapan jika terjadi bencana.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada seluruh pihak Kantor Kelurahan Tembok Dukuh, Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk melakukan pengabdian masyarakat ini. Serta terimakasih kepada pihak yang terlibat dalam membantu kelancaran kegiatan pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

- Christian, K. R., Jayanti, S., & Widjasena, B., 2017. Analisis Sistem Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*. 3(3). 465-474.
- Dinas Kebakaran Kota Surabaya, 2012. *Pedoman pelajaran dasar pencegahan/pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa*. Surabaya: Pusat pendidikan dan pelatihan kebakaran Kota Surabaya.

- Faeliskah, F., Kurniawan, B., & Suroto, S. (2017). Analisis Implementasi Sistem Tanggap Darurat Berdasarkan OHSAS 18001:2007 Klausul 4.4.7 di PT X Kalimantan Selatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*. 5(1). 350–357.
- Glorius, Y. & Panjaitan, T. W., 2013. Perancangan Emergency Response Plan di PT E-T-A Indonesia.
- Hakim, L. (2019). Kerangka Kerja Kesiapan Menghadapi Bencana. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 10(1), 1–11.
- Heryawan, I., 2015. Kebakaran Meningkat, Kinerja Dinas Kebakaran Surabaya Tak capai Target. [Online] Available at: http://www.rri.co.id/post/berita/156938/daerah/kebakaran_meningkat_kinerja_dinas_kebakaran_surabaya_tak_capai_target.html [Accessed 15 April 2015].
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tentang Keselamatan Kerja. Jakarta. 1970
- Rahadian, L., 2015. CNN Indonesia. [Online] Available at: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150313105726-20-38880/kebakaran-wisma-kosgoro-pecahkan-rekor-asia/> [Accessed 22 april 2015].
- Salindeho, Injilia K., Umboh, Jootje M. L., Sondakh, & Ricky C. (2020). Gambaran Penerapan Sistem Tanggap Darurat Kebakaran di PT. Nutrindo Fresfood Internasional Kota Bitung. *Jurnal KESMAS*. 9(7). 72-77.
- Sambada, G. H., Kurniawan, B. & Suroto, S. Analisis Sistem Tanggap Darurat Kebakaran di Container Yard 02 Terminal Petikemas PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Semarang Tahun 2016. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 4(4). 667-672.
- Sujatmiko, W., Dipojono, H. K., Soelami, F. & Soegijanto, 2014. Performancebased fire safety evacuation in high-rise building flats in Indonesia-A Case Study in Bandung. *Procedia Environmental Sciences*. 20. 116-125.

Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2022 Nikhen Hanifah Alvianshah, Moch. Sahri

Published by LPPM of Universitas Mathla'ul Anwar Banten in collaboration with the Asosiasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)